



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611

Telepon: (0756) 21218 Faksimile (0756) 21218,

Laman <http://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

Painan, 26 Januari 2026

Nomor : 000/22/DINKESPPKB/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian data LPPD dan LKPj Tahun 2025

Yth. Bupati Pesisir Selatan
Cq. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor: 100.1.7/1/SETDA
PESEL/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Permintaan Data LPPD dan LKPj Tahun
2025, berikut disampaikan data LPPD dan LKPj Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan



Agustina Rahmadani.S.ST, M.M
Pembina Tk I/ IV b
NIP.197908102003122006



2025

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**



<https://dinkes.pesisirselatan.kab.go.id>



dinkessessel



DINAS KESEHATAN_PESSEL



Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 20 Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



AGUSTINA RAHMADANI, S.ST.MM

Pembina Tk.I/ IV b

NIP.19790810 200312 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	4
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	4
2.2. Sasaran Strategis	12
2.3. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Kinerja Program yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	12
2.4. Kebijakan Strategis	19
2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024	19
BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	22
3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintahan Tingkat Diatasnya	22
3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat Dibawahnya	22
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. La.tar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	4
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	4
2.2. Sasaran Strategis	12
2.3. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Kinerja Program yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	12
2.4. Kebijakan Strategis	19
2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024	19
BAB III CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	22
3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintahan Tingkat Diatasnya	22
3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat Dibawahnya	22
BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui pemantapan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan good governance.

Dinas Kesehatan Kabuapten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanan urusan pemerintahan bidang Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Dan diturunkan dengan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan:

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Sekretariat
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana

3. Bidang Kesehatan Masyarakat :
 - a. Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana
 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana
 5. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a. Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana
 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - a. Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana
 - b. Sumber Daya manusia
- Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 adalah 89 orang dengan jabaran tabel di bawah ini :

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah(orang)
1.	Pasca Sarjana	14
2.	Sarjana	41
3.	Diploma	21
4.	SMA	13

Sumber : Bezetting Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang ber Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai gambaran capaian kemajuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu satu tahun, serta sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan

Memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.213.705.216,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 360.568.299.290,50,- atau 94,83%, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						380.213.703.215	360.568.299.290
I	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian AKIP Dinas Kesehatan	Nilai	A (81)	A(80,81)	262.074.420.487	248.309.974.555
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	148.825.006	143.533.654
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	8	8	60.177.110	56.016.247
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	12	12	88.647.896	87.517.407
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	145.316.557.329	139.406.153.456
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan asn	orang	1.200	1.190	144.913.919.247	139.039.718.148
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	323.493.428	293.618.380
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD	dokumen	12	12	79.144.654	72.816.928
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan penunjang Pelayanan	unit	22	22	114.781.323.023	107.265.958.509

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	angka	91	91	1.664.579.581	1.385.943.350
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				132.744.000	126.551.997
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah	dokumen	12	12	96.017.000	95.732.122
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	dokumen	12	12	36.727.000	30.819.875
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				132.248.518	79.382.900
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai perangkat daerah	dokumen	50	50	54.700.518	48.132.900
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	12	12	77.548.000	31.250.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				263.487.506	230.318.751
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	15	15	13.028.067	11.658.500
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang	paket	3	3	41.204.310	39.046.500
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	6	6	25.001.067	22.744.081
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	dokumen	3	3	5.400.000	4.650.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan	12	12	34.505.000	31.587.600
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	105	105	101.856.500	88.983.070
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	60	60	42.492.562	31.649.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan				248.464.050	164.302.098
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	16	16	248.464.050	164.302.098

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan				499.189.810	394.808.356
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	laporan	24	24	262.489.936	184.488.356
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	12	12	236.699.874	210.320.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				520.694.215	469.962.148
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	kendaraan	1	1	39.190.000	30.379.350
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	kendaraan	20	20	235.293.415	203.104.298
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	peralatan	20	20	13.000.000	11.750.000
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	sarana	1	1	230.210.800	224.728.500
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Aset	5	-	3.000.000	-
		PENATAAN ORGANISASI	Persentase hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				30.887.030	29.002.686
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	dokumen	12	12	30.887.030	29.002.686

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	persentase	125/100.000 KH	117/100.000 KH	116.362.927.083	110.830.303.116
			Angka Kematian Bayi (AKB)	persentase	10/1.000 KH	13/1.000 KH		
			Prevalensi Stunting	persentase	6.50 %	6.40 %		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					58.139.796.346	55.734.662.873
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Fasilitas	16	16	18.583.133.210	18.500.802.014
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Fasilitas	1	1	5.816.973.675	5.345.369.563
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	rumah	1	1	4.426.222.900	4.147.927.626
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	yang	12	12	1.403.077.455	1.317.010.605
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket alat kesehatan yang diadakan	Paket	20	20	12.817.517.426	12.125.944.721
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	alat	15	15	305.022.200	286.228.045
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	obat	12	12	14.650.138.048	13.912.227.144
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Pendekatan	80	80	34.786.700	13.906.700
		Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan habis pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	distribusi	21	21	102.924.732	85.246.455
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					58.000.365.539	54.902.837.219
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	ibu	6.494	6.494	946.757.640	956.412.820
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	ibu	6.474	6.474	213.198.540	181.721.565
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	bayi	6.526	6.526	18.559.885	14.031.262
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	balita	36.168	36.168	49.007.100	39.693.316

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	anak	57.062	57.026	853.897.750	758.379.570
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	penduduk	137.511	137.511	161.825.300	123.477.850
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	penduduk	55.495	55.495	147.979.850	129.133.229
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	penderita	40.648	40.648	51.529.600	40.707.500
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	penderita	5.060	5.060	58.837.300	49.930.662
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	orang	1.135	1.135	584.271.300	541.469.641
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	7.198	7.198	304.455.940	287.019.790
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana	dokumen	1	1	66.136.050	56.160.565
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	21	21	4.099.396.720	3.627.813.608
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	dokumen	21	21	358.557.802	337.703.602
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	21	21	550.740.498	495.581.303
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12	266.880.400	252.678.963
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	dokumen		7	54.200.200	30.081.300
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	22	22	543.374.382	391.168.050
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	100	100	151.720.000	142.720.000
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	22	22	1.956.624.118	1.914.969.580
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1	35.842.895.857	35.051.247.796
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah spesimen penyakit Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang didistribusikan	spesimen	100	100	117.375.000	80.085.800

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	dokumen	1	1	216.621.118	182.419.185
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitas kesehatan yang Terakreditasi di kabupaten/kota	Fasilitas	5	5	75.777.484	70.298.550
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya	dokumen	2	2	492.129.635	475.762.890
		Pengelolaan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Dokumen Pengelolaan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Dokumen	12	12	40.566.290	32.256.440
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Operasional Rumah Sakit	Dokumen	1	1	2.437.040.100	2.406.155.726
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Operasional Puskesmas	Dokumen	252	252	4.982.552.675	4.283.236.507
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	2.379	2.379	49.858.990	45.360.990
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria sesuai standar	orang	4.729	4.729	20.298.740	12.570.290
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar	orang	12	12	603.720.825	540.076.162
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen	32	32	368.579.700	185.420.907
		Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	8	8	1.048.344.250	926.522.500
		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	tatanan	5	5	68.184.500	22.029.300
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	dokumen	12	12	218.470.000	218.540.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					71.918.352	70.293.084
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	1	71.918.352	70.293.084
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					150.848.846	122.509.940
		Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah dokumen Hasil Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	dokumen	8	8	70.484.200	52.668.080
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Fasilitas	21	21	80.362.646	69.841.860

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI)	persentase	125/100.000 KH	117/100.000 KH	1.340.708.220	1.064.636.116
			Angka Kematian Bayi (AKB)	persentase	10/1.000 KH	13/1.000 KH		
			Prevalensi Stunting	persentase	6.50 %	6.40 %		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota		SDMK			235.328.300	227.713.706
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	30	30	17.430.000	15.877.960
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	orang	800	800	173.314.250	168.847.006
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	53	53	44.584.050	42.988.740
		Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					999.443.900	739.271.010
		Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM tingkat daerah yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	SDMK	300	300	999.443.900	739.271.010
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					105.936.020	97.651.400
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah rekomendasi Izin Operasional puskesmas Rumah sakit dan klinik Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	dokumen	30	30	42.518.400	36.437.460
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Yang dibina	Pegawai	600	600	63.417.620	61.213.940
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Angka Kematian Ibu (AKI)	persentase	125/100.000 KH	117/100.000 KH	85.498.200	72.301.130
			Angka Kematian Bayi (AKB)	persentase	10/1.000 KH	13/1.000 KH		
			Prevalensi Stunting	persentase	6.50 %	6.40 %		
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					44.413.000	41.315.580
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)	dokumen	50	50	44.413.000	41.315.580
		Penerbitan Sertifikat Produksi IRT Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi Makanan dan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT					31.500.200	24.750.550
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	dokumen	50	50	31.500.200	24.750.550

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air					9.585.000	6.235.000
		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam)	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam)	dokumen	35	35	9.585.000	6.235.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI)	persentase	125/100.000 KH	117/100.000 KH	350.149.225	291.084.373
			Angka Kematian Bayi (AKB)	persentase	10/1.000 KH	13/1.000 KH		
			Prevalensi Stunting	persentase	6.50 %	6.40 %		
		Advokasi, pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota					24.621.750	23.052.981
		Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	12	12	24.621.750	23.052.981
		Pelaksanaan Sehat Dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					45.244.150	39.033.842
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	dokumen	12	12	26.614.600	24.649.552
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	12	18.629.550	14.384.290
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					280.283.325	228.997.550
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	12	12	280.283.325	228.997.550

2.2 Sasaran Strategis

Tabel 2.2.

Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
Tahun 2025.

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025				
			Satuan	Target		Realisasi	Capaian
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat							
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1 Nilai AKIP Dinas Kesehatan		A (90)	A(81)	A(80.81)*	99,77
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Masyarakat	2 Angka Kematian Ibu (AKI)	/ 100.000 KH		125	117	106,40
		3 Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1000 KH		10	13	70,00
		4 Prevalensi Stunting (EPPGBM)			6,50%	6,40%	101,54
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	5 Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kesehatan	%	100%	91	91	100,00
Rata-rata capaian Indikator 3 Sasaran Strategis : 5 Indikator Kinerja							95,54

* Nilai tahun 2024

2.3. Analisis kesesuaian kegiatan dengan kinerja program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

I. Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja

- Target kinerja A(81)
- Realiasi kinerja : 80,81 (nilai Tahun 2024)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat yang dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan teknik "criteria referenced survey". dengan cara menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing masing komponen yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pagu anggaran : Rp. 147.293.097.464,-
- Realisasi : Rp. 141.044.015.946,-
- ✓ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- ✓ Administrasi Keuangan Daerah;
- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran

II. Meningkatnya Kesehatan Keluarga Masyarakat

Target Kinerja :

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Target : 125/100.000 KH

Realisasi : 117/100.000KH

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan formula dibawah ini :

$$\text{Formula} = \text{AKI} = \frac{\text{JKI}}{\text{JLH}} \times 100.000$$

AKI = Angka Kematian Ibu

JKI = Jumlah Kematian Ibu

JLH = Jumlah Kelahiran Hidup

Jumlah ibu mati tahun 2025 adalah 8 orang

Jumlah kelahiran hidup adalah 6.851 orang

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Target : 11/1.000 KH

Realisasi : 13/1.000 KH

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan formula dibawah ini :

jumlah kematian bayi	x	1.000
jumlah kelahiran hidup		

Jumlah bayi mati tahun 2025 adalah 91 orang

Jumlah Kelahiran hidup adalah 6,851 orang

c. Prevalensi Stunting (EPPGBM)

Target : 6,50 %

Realisasi : 6,40 %

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan formula dibawah ini :

$$\text{PAB(2)SPstunting} = \frac{\text{JPKKJAB(2)SP stunting}}{\text{JAB(2)}} \times 100\%$$

PAB(2)Pstunting : prevalensi anak baduta pendek stunting

JAB(2) : Jumlah anak baduta sangat pendek

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

- Pagu anggaran : Rp. 59.339.106.569,-
- Realisasi : Rp. 56.928.716.560,-
- ✓ Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota.
 - ❖ Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - ❖ Pengembangan Rumah Sakit
 - ❖ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - ❖ Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - ❖ Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas
 - ❖ Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 - ❖ Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya
- ✓ Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif K
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi
 - ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV

- ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana
- ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olah raga
- ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- ❖ Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- ❖ Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- ❖ Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- ❖ Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- ❖ Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional
- ❖ Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat
- ❖ Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota
- ❖ Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- ❖ Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- ❖ Operasional Pelayanan Puskesmas
- ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
- ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
- ❖ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
- ❖ Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
- ❖ Pengelolaan Layanan Imunisasi
- ❖ Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
- ❖ Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan
- ✓ Penyelenggaraan siskes secara terintegrasi
 - ❖ Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- ✓ Penerbitan izin rumah sakit kelas c,d dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota
 - ❖ Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
 - ❖ Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

- (2) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan
- Pagu anggaran : Rp.1.340.708.220,-
 - Realisasi : Rp. 1.064.636.116,-
 - ✓ Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia untuk ukp dan ukm di wilayah kabupaten / kota
 - ❖ Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - ❖ Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
 - ❖ Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - ✓ Pengembangan mutu peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota
 - ❖ Pengembangan Mutu Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 - ✓ Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota
 - ❖ Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - ❖ Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- (3) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- Pagu anggaran : Rp. 85.498.200,-
 - Realisasi : Rp. 72.301.130,-
 - ✓ Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
 - ❖ Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)
 - ✓ Penerbitan sertifikat produksi irt dan nomor p-irt sebagai izin produksi makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT
 - ❖ Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
 - ✓ Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (tpm) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)

- ❖ Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum(dam)

(4) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

- Pagu anggaran : Rp. 152.920.800,-
- Realisasi : Rp. 137.987.273,-
- ✓ Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan psm dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota
 - ❖ Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- ✓ Kegiatan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah kabupaten/kota
 - ❖ Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - ❖ Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- ✓ Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (ukbm) tk. daerah kabupaten/kota
 - ❖ Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Kesehatan Masyarakat (UKBM)

III. Meningkatnya Kualitas Inovasi

Target kinerja : 91 %

Realisasi : 91 %

Indikator penilaian kinerja ini adalah Hasil penilaian saat pengentrian inovasi pada aplikasi IGA”

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pagu anggaran : Rp. 147.293.097.464,-
- Realisasi : Rp. 141.044.015.946,-
- ✓ Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat
 - ❖ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - ❖ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- ✓ Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - ❖ Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ✓ Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - ❖ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - ❖ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- ✓ Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - ❖ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
 - ❖ Operasional atau Lapangan Sekretaris Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - ❖ Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- ✓ Kegiatan penataan organisasi
 - ❖ Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Dari uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator dari 3 sasaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

2.4. Kebijakan Strategis

Untuk Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tidak melakukan kebijakan strategis apapun terhadap program, kegiatan, maupun sub kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

2.5. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 .

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<i>Agar Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penempatan aparatur atau pejabat di Puskesmas dengan memperhatikan kapasitas dan kapabilitas aparatur sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan dapat optimal. Termasuk di jajaran RSUD dr. M. Zein Painan.</i>	penempatan sesuai analisa kebutuhan tenaga (ANJAB ABK) setiap individu disesuaikan dengan kondisi ruangan masing masing, mempertimbangkan kondisi masing – masing individu antara lain : tingkat pendidikan, kompetensi yang dimiliki, lama bekerja, pengalaman penempatan dan hal hal positif yang dimiliki seperti tambahan pengalaman dan diklat serta sertifikat keilmuan / kompetensi yang dimiliki.
2.	Untuk tertib pelayanan dan meminimalkan masalah terhadap pelayanan pasien bermasalah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Zein Painan agar jajaran RSUD dr. M. Zein Painan menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pasien bermasalah.	Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pasien dengan pembiayaan BAZNAS di rumah sakit merupakan panduan yang dibuat berdasarkan kerja sama antara rumah sakit dan BAZNAS daerah setempat . SOP ini mengintegrasikan alur pelayanan medis standar rumah sakit dengan persyaratan administrasi dan verifikasi kelayakan mustahik (penerima bantuan) dari BAZNAS.
3.	Agar biaya berobat bagi pasien kurang mampu digratiskan minimal sampai Rujukan Rumah Sakit Umum M. Djamil Padang	Biaya berobat pasien kurang mampu di RSUD dr. M. Zein Painan sudah digratiskan melalui skema kerjasama dengan Baznas termasuk biaya ambulan rujukan ke Rumah Sakit dr. M. Djamil Padang. Pasien hanya diminta melengkapi persyaratan administrasi yang terdiri dari Surat Keterangan Miskin dari Wali Nagari setempat, Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Surat Rekomendasi dari Baznas. Biaya Pasien semuanya menjadi tanggungjawab Baznas ke RSUD.
4.	<i>Diharapkan kepada manajemen RSUD dr. M. Zein Painan agar dapat merasionalisasi terhadap honor tenaga kontrak dan anggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) aparatur, serta pada Dinas Kesehatan jasa medis dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Puskesmas yang terlalu kecil agar dapat dievaluasi</i>	<i>Untuk besaran honor tenaga kontrak adalah berdasarkan kesanggupan dari pembiayaan operasional RS dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut : jumlah tenaga BLUD di tahun 2025 adalah sebanyak 310 orang sehingga untuk biaya honor masing – masing adalah : Dokter/ Apoteker sebesar Rp. 1.400.000,- S1 sebesar Rp. 875.000,- DIII sebesar Rp.</i>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<i>untuk meningkatkan profesionalitas kerja dan motivasi kerja.</i>	770.000,- DII sebesar Rp 735.000,- SMA sebesar Rp. 700.000,- SMP/ SD sebesar Rp. 525.000,- Dari sekian banyak beban tenaga BLUD maka, secara rasional RSUD dr. M. Zein Painan mampu untuk besaran gaji tenaganya.
5.	<i>Untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan supaya pasien tidak menumpuk agar RSUD dr. M. Zein Painan menerapkan pendaftaran sistim elektronik bagi pasien yang berobat.</i>	Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan, efisiensi kerja, dan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dengan ini kami disampaikan bahwa Rumah Sakit dr.Muhammad Zein Painan sudah mengimplementasikan Sistem berbasis elektronik, yaitu : 1. Rekam Medis Elektronik Rumah Sakit Dr.muhammad zein Painan terhitung mulai pertengahan tahun 2024 sudah melaksanakan Rekam Medis Elektronik (SIMGOS) di unit pelayanan rawat jalan / poliklinik. Tujuan dari penggunaan rekam medis elektronik diantaranya adalah Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencatatan data pasien, mempercepat akses informasi medis pasien yang akurat dan lengkap, mengurangi penggunaan dokumen berbasis kertas. Sejalan dengan penggunaan SIMGOS dan pemenuhan kelengkapan serta penyempurnaan menu dalam aplikasi yang dapat memenuhi standar komponen pelayanan, sistem ini juga dikembangkan untuk digunakan di layanan IGD dan rawat inap. 1. Mobile JKN Aplikasi Mobile JKN berfungsi sebagai pintu utama akses digital bagi peserta JKN untuk mendapatkan layanan di rumah sakit tanpa perlu antrean fisik yang lama. Penggunaan Mobile JKN memungkinkan peserta JKN untuk dapat mengakses layanan digital seperti antrian online rujukan dari puskesmas ke rumah sakit dan skrining kesehatan sehingga mengurangi antrean fisik dan mempermudah alur pelayanan administrasi cukup dengan ponsel pasien / peserta JKN. Untuk penggunaan aplikasi Mobile JKN bagi pasien di Rumah sakit dr.Muhammad Zein Painan akan dibantu / dipandu oleh petugas bagaimana cara pendaftaran dan mem-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		berikan solusi apabila ditemui kendala oleh pasien dalam mengakses aplikasi ini. Penggunaan Rekam Medis Elektronik dan Mobile JKN diharapkan dapat mengatasi penumpukan pasien dan meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat alur pelayanan kesehatan di RS dr.Muhammad Zein Painan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan.

3.2 Identifikasi tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada tingkatan Pemerintahan Tingkat di bawahnya

Tidak ada indentifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan Tingkat di bawah Dinas Kesehatan, karena tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah digunakan untuk biaya pelaksanaan program dan kegiatan. Dan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2025 memiliki capaian sebesar 94,83% dalam melaksanakan 5 Program, 23 Kegiatan dan 88 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 280.213.703.231.- dari total Pagu anggaran sebesar Rp. 360.568.299.308.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat dan juga tidak memberikan pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan di bawahnya dalam bentuk Tugas Pembantuan.
3. Dokumen LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 akan menjadi masukan terhadap penyusunan LKPJ Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.